

Judul : Kuota pertalite dan solar ditambah
Tanggal : Kamis, 14 April 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 1

Kuota Pertalite dan Solar Ditambah

■ INTAN PRATIWI

JAKARTA — Komisi VII DPR menyetujui usulan pemerintah untuk menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar. Penambahan perlu dilakukan karena kuota BBM bersubsidi diprediksi bakal habis sebelum akhir tahun.

Usulan penambahan kuota disampaikan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4). Arifin mengatakan, kenaikan harga BBM nonsubsidi membuat masyarakat beralih ke BBM subsidi.

Arifin memaparkan, realisasi serapan Pertalite hingga 2 April 2022 telah mencapai 6,48 juta kiloliter (kl) dari kuota 2022 sebesar 23,05 juta kl. Sementara itu, solar subsidi sudah terserap 4,08 juta kl dari kuota tahun ini 15,10 juta kl.

"Dengan kondisi ini memang dari kunjungan kami di beberapa daerah, kami menilai perlu ada tambahan kuota untuk solar dan Pertalite untuk tahun ini," ujar Arifin.

Arifin memerinci, pemerintah meminta tambahan kuota solar sebesar 2,29 juta kl atau menjadi 17,39 juta kl untuk tahun ini. Sementara untuk Pertalite, pemerintah meminta tambahan 5,45 juta kl atau menjadi 28,50 juta kl pada tahun ini.

Menteri ESDM menegaskan, penambahan kuota ini sebagai salah satu respons jangka pendek pemerintah atas lonjakan harga minyak mentah dunia. Di sisi lain, permintaan terhadap BBM tersebut juga menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan prediksi Kementerian ESDM, kuota BBM subsidi, seperti Pertalite, akan habis pada Oktober. Menurut dia, konsumsi Pertalite mengalami peningkatan sebesar 14 persen pada kuartal I 2022.

Arifin dalam rapat dengan Komisi VII memberikan sinyal akan menaikkan harga jual Pertalite dan solar dalam waktu dekat. Ia mengatakan, konflik geopolitik yang masih memanas dan harga minyak dunia yang masih tinggi akan menjadi beban APBN. Sebab, kenaikan harga minyak dunia satu dolar AS maka akan berdampak pada beban APBN mencapai Rp 5,7 triliun.

"Strategi menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia untuk jangka menengah akan dilakukan penyesuaian harga Pertalite dan solar," ujar Arifin.

Arifin menjelaskan, Indonesian Crude Price (ICP) per April sebesar 113 dolar AS per barel. Padahal, APBN hanya mematok 63 dolar AS per barel.

Adapun harga bensin Pertalite dan solar subsidi pada periode 1 April 2022 ini tidak mengalami perubahan di mana masing-masing masih dipertahankan

Bersambung ke hlm 7 kol 1-4

Kuota Peralite dan Solar Ditambah dari hal 1

pada Rp 7.650 per liter dan Rp 5.150 per liter. Sementara, harga Pertamina (RON 92) sudah dinaikkan menjadi Rp 12.500-Rp 13.000 per liter dari sebelumnya Rp 9.000-Rp 9.400 per liter.

Sementara, harga solar non-subsidi kini sudah dibanderol sebesar Rp 12.950 - Rp 13.550 per liter untuk jenis Dexlite (CN 51). Artinya, ada selisih setidaknya Rp 7.800 per liter dengan harga solar bersubsidi.

Komisi VII DPR menyatakan mendukung usulan Menteri ESDM untuk menambah kuota BBM subsidi. Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menjelaskan, pembahasan penambahan kuota akan dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran DPR (Banggar). Hanya saja, dari Komisi VII DPR menampung aspirasi ini mengingat saat ini kebutuhan masyarakat atas Peralite dan solar juga tinggi menjelang Idul Fitri.

"Kami mendukung usulan ini. Hanya saja, ini perlu dibahas lebih lanjut di Banggar," ujar Sugeng.

Hanya saja, kata Sugeng, penambahan kuota ini tidak bisa berjalan optimal tanpa dibarengi pengawasan dan penyaluran yang tepat. Sugeng meminta pemerin-

tah dan Pertamina bisa melakukan perubahan penyaluran dan pengetatan pengawasan.

"Kami meminta pemerintah juga bisa meningkatkan pengawasan. Kalau perlu, kita perlu aparat penegak hukum juga sebagai langkah detensi," ujar Sugeng.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, pemerintah mestinya terlebih dulu memperbaiki cara penyaluran subsidi energi, bukan malah menaikkan harga jual ke masyarakat.

Dengan adanya kenaikan harga Peralite, kemungkinan besar laju inflasi tidak terbungkus oleh pemerintah. Sampai akhir 2022, pemerintah telah mematok inflasi sebesar 3 persen plus minus 1 persen (yoy).

"Dampak inflasinya sangat besar dan ini akan ditanggung oleh masyarakat kelas bawah," kata Faisal, Rabu (13/4).

Ia menilai, kenaikan harga jual Peralite akan membuat daya beli masyarakat terpengas dan pertumbuhan konsumsi akan tertahan. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak maksimal.

"Dampaknya pun akan meluas, mulai dari penyerapan tenaga kerja rendah dan upaya pe-

ngentasan kemiskinan menjadi terganggu."

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi menambahkan, pemerintah harus lebih dulu menata penyaluran BBM subsidi. Selama ini penyaluran subsidi energi tidak tepat sasaran sehingga masih banyak masyarakat miskin yang tidak bisa menikmatinya.

Atas dasar itu, Fahmy menyarankan agar pemerintah melakukan distribusi semi tertutup. "Semi tertutup ini bisa dilakukan, misalnya, kelompok miskin yang memiliki kartu prasejahtera tetap akan mendapatkan haknya. Sementara, orang tidak memiliki kartu tersebut harus membeli dengan harga di pasar atau tidak disubsidi," katanya.

Tarif listrik

Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII juga memberikan sinyal kenaikan tarif listrik pada tahun ini. Alasan dia, karena beban APBN untuk membayar kompensasi ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah semakin berat.

Arifin menjelaskan, kenaikan harga minyak dunia dan kurs menambah beban APBN dalam sisi subsidi ataupun pemberian kompensasi kepada BUMN yang menjual barang dengan harga ditahan. Untuk itu, kata Arifin,

perlu langkah strategis untuk mengurangi beban APBN.

"Dalam jangka pendek ini, *tariff adjustment* akan dilakukan tahun ini," ujar Arifin.

Tariff adjustment yang dimaksud adalah mekanisme mengubah dan menetapkan naik atau turunnya tarif listrik ke masyarakat sesuai dengan parameter ekonomi, yaitu kurs rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), dan harga batu bara acuan serta inflasi.

"Dengan penetapan *tariff adjustment* ini, APBN bisa menghemat Rp 7 triliun-Rp 16 triliun," ujar Arifin.

Besaran tarif rata-rata untuk pelanggan rumah tangga non-subsidi saat ini sebesar Rp 1.445 per kWh. Besaran tarif ini jauh lebih murah dibanding tarif listrik rumah tangga di Thailand yang mencapai Rp 1.597 per kWh, Vietnam Rp 1.532 per kWh, Singapura Rp 2.863 per kWh, dan Filipina Rp 2.421 per kWh.

Sementara untuk golongan bisnis menengah-TR, tarif listrik di Indonesia ditetapkan sebesar Rp 1.445 per kWh, masih lebih murah dibandingkan di Filipina (Rp 1.636/kWh), Malaysia (Rp 1.735/kWh), Vietnam (Rp 1.943/kWh), dan Singapura (Rp 2.110/kWh). Tarif Indonesia untuk golongan ini hanya sedikit di atas Thailand (Rp 1.413/kWh).

■ ed: salma kartika yudha